

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Politik merupakan ruang luas yang penuh dengan ketidakpastian, namun bila dilihat secara etimologi kata politik berasal dari kata benda yakni "polis" yang artinya negara, kota. Pada awalnya makna politik lebih menyeluruh terarah kepada segenap kegiatan sosial serta pemerintahan maupun *civil society*. Makna politik sekarang lebih spesifik yakni negara dan kuasa, persoalan "siapa dapat apa, kapan dan bagaimana?" serta persoalan distribusional, politik pun pada akhirnya ikut menyeret persoalan negara. Konsep negara dan kewarganegaraan lahir pada masyarakat Yunani kuno, yang mana gagasan ini telah dicetuskan oleh Plato, di dalam negara 'polis' (kota) kepentingan negara mengatasi kepentingan individu. Pengorganisasian polis turut menyebabkan setiap warga negara sederajat dimana setiap warga negara bisa mengambil bagian dalam urusan negara, namun tetap saja dalam negara ada batasan hak kewarganegaraan atas kelompok minoritas yakni kaum pendatang, para budak dan perempuan.

Dalam politik tidak ada suatu kepastian tunggal yang dapat dijadikan pegangan dan tidak ada benar atau salah, yang ada adalah artikulasi kepentingan dan ketidakpastian. Kepentingan selalu menyangkut dua hal yakni pihak yang diutamakan dan pihak yang terpinggirkan, pada pihak yang terpinggirkan inilah kaum perempuan berada. Bahkan dalam suatu hubungan negara, "politik serta kewarganegaraan" perempuan selalu menempati posisi kedua. Keadaan yang mengemuka adalah politik selalu identik dengan laki-laki (politik = laki-laki), sulit untuk memasukkan perempuan di dalamnya bahkan masih dianggap aneh jika perempuan masuk dalam politik atau ikut campur dalam segala hal yang berkaitan dengan politik.

Situasi tersebut telah berlangsung semenjak istilah politik itu sendiri muncul, Plato dan Aristoteles telah mengemukakan betapa minimnya peran perempuan dalam politik dan negara. Plato menyatakan dengan tegas bahwa tugas

perempuan dalam kewarganegaraan berkaitan dengan peran reproduksinya. Pengambilan keputusan penting dilakukan laki-laki sesuai dengan perannya di lingkup publik yaitu penguasa sementara perempuan lebih dianggap sebagai pihak yang dikuasai. Sementara Aristoteles menggambarkan hubungan antara politik, negara serta perempuan, Aristoteles menyatakan bahwa negara adalah ciptaan dari alam dan laki-laki secara alami adalah binatang politis. Dia juga menganalogikan negara sebagai rumah tangga dimana di dalam rumah tangga terdiri dari budak dan orang bebas, negara diatur seperti manajemen domestik. Ada dua hal yang terjadi disini, yakni ada yang harus berkuasa dan ada yang harus dikuasai, bukan saja karena dibutuhkan tetapi karena memang begitu keadaannya. Laki-laki menurut Aristoteles secara alami superior dan perempuan inferior, yang satu berkuasa sementara yang satu dikuasai.<sup>1</sup>

Perjuangan perempuan untuk bisa masuk dalam sebuah bangunan politik membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sejarah politik kaum perempuan bukanlah monumen yang tegak tak bergerak, sejarah perempuan bukan pula bangunan yang statis memijak bumi. Pada 4 Juni 1913, seorang perempuan bernama Emily Davison tewas diinjak oleh kuda Raja George V setelah dia secara sengaja menabrakkan diri ke kereta sang Raja. Davison adalah martir, apa yang dilakukan olehnya adalah bagian dari tindakan-tindakan ekstrem para anggota gerakan *Suffragette* yang menginginkan kesetaraan hak pilih bagi perempuan sebagaimana lelaki. Sebagai reaksi terhadap gerakan ini, pemerintah Inggris bahkan mengeluarkan *Cat and Mouse Act* demi membatasi simpati publik terhadap gagasan kesetaraan.

*Suffragette* mencoba mempertanyakan logika di balik penindasan terhadap perempuan dalam politik dan pertanyaan itu menohok ke hal dasar yang menjadi basis kekuasaan Raja Inggris serta penguasa-penguasa politik lainnya, pertanyaan yang dilontarkan adalah: kesewenangan, serta hal yang tidak hadir dalam kekuasaan politik, yakni: keabsahan dan dukungan rakyat. Penindasan terhadap perempuan jelas menjadi catatan kelam sejarah manusia. *Suffragette* dan gerakan-gerakan sejenis lainnya, baik ia diusung oleh lelaki maupun perempuan, telah menjadi bagian dari mereka yang mempertanyakannya. Pertanyaan itulah yang

---

<sup>1</sup> Gadis Arivia, *Filsafat Berperspektif Feminis*, hal. 30.

kemudian menjadi gugatan yang menggugah segenap umat manusia untuk menempatkan perempuan pada peran yang proporsional.

Keadaan seperti ini tidak selamanya diam berlangsung namun mengalami fase perkembangan secara perlahan terutama setelah apa yang telah dilakukan oleh kaum feminis radikal dalam membongkar keadaan terselubung politik yang telah diciptakan oleh kaum laki-laki. Kaum feminis radikal sendiri terkenal dengan slogannya yakni *the personal is political*<sup>2</sup>, disini persoalan politik bukan lagi untuk membahas mengenai hak untuk memilih melainkan suatu persoalan yang lebih radikal dalam keberadaan politik yang selalu terselubung, yakni persoalan penindasan terhadap perempuan dalam ranah privat sehingga membuat perempuan tidak dapat berperan serta dalam ranah publik. Ada suatu hal yang terlupa dan tertutup pada gelombang feminis sebelumnya, yakni pembahasan mengenai batasan ranah privat dan publik bagi perempuan yang tidak jelas serta penindasan terselubung yang terjadi didalamnya.

Laki-laki menggunakan politik untuk menyalurkan hasrat berkuasa mereka yang dimulai dengan menguasai perempuan di ruang privat kemudian menguasai perempuan dalam ruang publik. Sejak awal politik hadir pun laki-laki telah merumuskan bahwa merekalah yang berhak untuk berkuasa terhadap politik dan perempuan cukup untuk menurut saja. Laki-laki memandang potensi politik perempuan sebelah mata dan menganggap perempuan tidak akan mampu untuk masuk dalam ruang publik politik yang penuh intrik, hal ini tentu merupakan sebuah kekeliruan. Sesungguhnya, perempuan pada dirinya memiliki kekhasan yaitu mentolerir pertumbuhan tubuh lain dalam dirinya tanpa menjadi penyakit, tanpa penolakan ataupun kematian salah satu organisme hidup. Sementara laki-laki bergerak terbalik, artinya menata diri dengan menyingkirkan dari masyarakatnya sumbangan dari jenis kelamin yang lain. Ketika tubuh perempuan memberi keturunan dengan menghormati perbedaan, kelompok patriarkal dibangun secara hirarkis dengan menyingkirkan perbedaan.

Meski demikian, hingga saat ini perempuan masih terpinggirkan dalam dunia politik. Perempuan dijadikan alat serta boneka politik semata dan akhirnya menjadi kaum minoritas yang inferior dan terbungkam. Perempuan oleh masyarakat

---

<sup>2</sup> *Oxford Reading in Feminism, Feminism, the Public and the Private*, hal. 1.

dipaksa untuk menerima diri mereka sebagai pembawa hal baru dalam tahap-tahap perpolitikan, namun akses yang sulit ke kancah politik membuat mereka akhirnya hanya menjadi figuran dan tidak benar-benar berperan. Politik dan perempuan menjadi sebuah cerita perjuangan tanpa akhir, hal ini telah dimulai oleh feminis liberal yang berfokus pada hak berpolitik terutama hak pilih dalam Pemilu. Di negara-negara Barat sendiri, fokus perjuangan kaum feminis awal terdiri antara lain hak pilih dalam Pemilu, hak atas kepemilikan, hak kepengasuhan, akses ke pendidikan, hak untuk bercerai dan untuk mendapatkan upah yang layak. Meski demikian, permasalahan perempuan dalam politik memiliki jaring-jaring kerumitan yang tak hanya terbendung melalui hak pilih semata, term politik yang begitu luas dan menyentuh banyak aspek pun menyeret jaring-jaring permasalahan yang menjelaskan terbungkamnya hubungan antara perempuan dan politik selama ini.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Politik dan perempuan dianggap asing jika berjalan beriringan namun politik dan laki-laki dianggap menjadi suatu kesepadanan serupa mata uang logam. Begitu banyak jaring-jaring persoalan yang harus dibongkar mengenai situasi posisi perempuan dalam politik, oleh karena itu disini sangat diperlukan sebuah sudut pandang feminis politik, kajian khusus yang membahas keadaan politik terhadap perempuan. Politik sebagai suatu kata yang terlihat sederhana dan terlihat umum dimengerti, sesungguhnya merupakan persoalan yang merangkul banyak aspek, politik tak semata-mata hanya mengenai hak pilih Pemilu maupun hak untuk turut dalam pemerintahan. Kaum feminis menjelaskan betapa politik telah merasuki dan bermain dalam segala ruang gerak perempuan. Politik tentu bukanlah persoalan teoritis maupun praktis semata namun juga menyeret persoalan ruang privat dan publik perempuan, posisi perempuan terkait dengan status sebagai warganegara, persoalan seksual dan juga tekstual, yang mana semua itu akan berujung pada pencarian bentuk maupun sistem politik yang mampu menciptakan identitas perempuan yang sebenarnya dalam politik.

*Definition of politics depend on what we think about politics*

[Kate Millet, 1969]

Penjelasan Kate Millet di atas menunjukkan betapa luasnya definisi politik, dapat disimpulkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh para kaum feminis semenjak gelombang pertama, kedua maupun ketiga merupakan sebuah usaha yang memiliki arah yang sama yakni usaha untuk mendobrak politik patriarkal. Jika dikatakan bahwa persoalan politik dan perempuan merupakan sebuah persoalan usang yang hanya ada pada feminis radikal maka hal ini merupakan sebuah kekeliruan besar. Politik selalu hadir dan menjadi persoalan utama yang harus dihadapi oleh feminis karena politik merupakan akar dari keberadaan patriarkal. Feminis gelombang ketiga yang terlihat cenderung membahas persoalan bahasa pun tetap tidak terlepas pada usaha pendobran politik patriarkal yang diwujudkan dalam bahasa, hal ini terlihat dari uraian Luce Irigaray dalam *house of language* dan Helen Cixous dalam *feminine writing*.

Meski demikian, usaha pada bahasa dan teks saja tidak cukup untuk menjabarkan jaring-jaring persoalan perempuan di dalam politik, diperlukan sebuah sistem yang mampu untuk mendobrak politik patriarkal yang terselubung dan feminis politik telah mampu memberikan berbagai jalan kebutuhan untuk memenuhi hal tersebut. Feminis politik turut mengarah kepada persoalan identitas perempuan dalam politik, berlakunya pembatasan perempuan dalam ruang privat dan publik, posisi perempuan sebagai warganegara serta sistem yang tepat dalam menimbang kedudukan perempuan di dalam politik. Feminis politik merupakan jalan yang sangat tepat untuk membongkar ketertundaan identitas perempuan dalam suatu sistem politik.

Identitas perempuan oleh feminis politik diarahkan pada sebuah identitas baru yang berbeda dengan apa yang pertama kali diusung oleh tokoh feminis awal Marry Wollstonecraft, sebuah pesimisme yang digagaskan olehnya yakni, 'perempuan harus bertingkah seperti laki-laki agar dapat masuk ke dalam politik praksis'. konsep ini dikenal selanjutnya sebagai "*Wollstonecraft Dilemma*"<sup>3</sup>. Identitas juga turut menunjukkan makna kewarganegaraan yang melekat pada diri perempuan, Carole Pateman bahkan

<sup>3</sup> Chantal Mouffe, *Feminism, Citizenship and Radical Democratic Politics*, hal. 374-375.

mempertanyakan 'siapa yang dimaksud dengan warga negara disini? Sebab seluruh tindakan yang dilakukan oleh tiap warga negara sesungguhnya berada dalam arena yang telah terkonstruksi citra maskulin. Lalu pertanyaan yang berikutnya muncul adalah apakah kewarganegaraan itu berpihak pada gender tertentu? Seluruh arah jawaban menuju kepada sikap ya. Feminis memahami politik kewarganegaraan sebagai politik yang tidak menyertakan perempuan. Perempuan diposisikan sebagai warga negara kelas dua yang termarginal (*second-class citizenship*), yang bermain disini adalah gejala ketidaksadaran patriarkal, kebudayaan patriarkal merupakan budaya yang monoseksual dimana laki-laki berbicara kepada laki-laki. Laki-laki memproyeksikan egonya pada dunia, yang kemudian menjadi cermin yang memungkinnya melihat bayangannya sendiri dimana-mana. Perlu dibangun kondisi subjektivitas perempuan, dimana perempuan dapat memperoleh "aku" yang berasal dari wacana mereka sendiri dan bukan sebagai turunan dari "saya" laki-laki.

Masalah perempuan dan kewarganegaraan disini dapat dianalogikan dengan kincir yang berputar dalam tiupan konspirasi besar laki-laki, sulit menemukan jalan keluar pada pihak yang menganggap bahwa ini bukan persoalan besar. Padahal kaum feminis menganggap ini bukanlah persoalan main-main, apalagi jika sudah dikaitkan dengan kepentingan pembangunan, peningkatan perekonomian dan sebagainya, dalam situasi tersebut hak perempuan sering diabaikan. Pemerintahan di negara-negara maju, terutama di negara berkembang juga sering melakukan pembodohan terhadap warga negara perempuan secara sistematis. Perempuan sengaja tidak diberdayakan, dibuat menjadi sangat penurut lewat propaganda-propaganda yang mensosialisasikan sosok perempuan apa yang ideal. Mereka tak jarang luput mengidentifikasi soal perempuan dalam pembangunan bahkan dengan sengaja merampas hak-haknya sebagai warga negara. Pada keadaan ini perempuan menjadi boneka dalam politik, perempuan tidak dapat membuka identitas mereka yang sebenarnya karena mereka harus menjadi apa yang diinginkan oleh laki-laki dalam konspirasi politik yang telah mereka buat secara kokoh.

Hal tersebut diperparah dengan adanya pemojokkan politik bagi perempuan melalui penindasan pada ruang privat perempuan atau yang lebih dikenal dengan slogan feminisme gelombang kedua yakni *the personal is political*, penindasan yang terjadi di ruang privat terjadi juga pada penindasan yang berlangsung di ruang publik. Ranah privat perempuan memiliki

tingkatan yang lebih rendah dibanding dengan ranah publik, penindasan muncul melalui dominasi atas seksualitas dan sistem gender yang terdapat di ranah privat. Agar identitas perempuan dapat hadir secara terbuka baik dalam ruang privat maupun publik politik diperlukan suatu sistem politik, suatu konsep politik yang mampu membuat ruang gerak perempuan dalam politik menjadi tak terbatas oleh ruang privat mereka. Konsep politik tersebut akan mampu menciptakan keobjektifan dalam peran gender, tidak ada lagi pihak yang termarginalkan karena penindasan konspirasi politik yang terselubung. Pembongkaran dengan menggunakan feminis politik akan menghasilkan politik yang ramah perempuan dan pro gender.

### 1.3 LANDASAN TEORI

Permasalahan antara perempuan dan politik tentu saja memiliki dasar teori yang melandasi dan ini dapat ditemukan pada tubuh feminis politik. Feminis politik harus dimengerti bukan sebagai bentuk pemisahan dari politik yang dirancang untuk mengejar kepentingan perempuan sebagai perempuan melainkan sebagai pengejaran dari tujuan feminis yang mana di dalamnya turut pula meliputi diskursus praktis dan relasi sosial. Feminis politik merangkum segala jaring persoalan yang terdapat antara perempuan dan politik seperti: persoalan kewarganegaraan, identitas perempuan, batasan ruang privat perempuan serta sistem politik yang memungkinkan untuk menampung perempuan dengan adil ke dalamnya.

Dalam teori feminis politik terdapat ledakan kritikan dalam rangka membebani para ahli teori politik terkemuka dimana mereka memiliki ide yang dibungkus dengan konsepsi normatif yang ada pada saat ini. Selain itu, feminis politik lebih eksplisit terfokus pada diskursus operasi *political life* dalam memasukkan atau mengeluarkan perempuan. Dalam prosesnya, akan ditemukan hal apakah yang memiliki potensi kemungkinan untuk digambarkan sebagai *turn towards politics* dalam suatu kajian feminis. Selain itu, sudut pandang teori politik umum seperti pandangan politik klasik maupun politik posmodern menjadi hal yang tidak kalah penting sebagai penuntun arah dalam merumuskan keidealan

sistem politik yang seharusnya diaplikasikan. Politik posmodern mengarahkan politik pada telos keadilan dan ini bisa menjadi celah yang baik dalam mendukung situasi yang adil, tidak hanya dalam sistem yang berlangsung namun juga dalam persoalan gender sehingga *sexual difference* tidak lagi menjadi suatu kriteria pembedaan yang digunakan dalam politik.

#### 1.4 TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan ini adalah:

- ❖ Menunjukkan bahwa persoalan politik merupakan persoalan yang tidak pernah usang dan tidak hanya menjadi persoalan pada gelombang kedua feminisme melainkan merupakan persoalan utama kaum feminisme karena akar dari patriarkal yang begitu kokoh terletak pada politik yang telah sangat melembaga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa jika ingin melawan patriarkal yang begitu mengakar (yang sekaligus menjadi persoalan utama feminis) maka jalan yang dapat ditempuh adalah dengan mendobrak konspirasi politik terselubung yang menjadi senjata utama patriarkal.
- ❖ Menunjukkan bahwa persoalan politik tidak hanya mengenai hak pilih semata ataupun keberadaan perempuan dalam badan legislatif melainkan turut menyeret ruang privat perempuan, seksualitas serta identitas perempuan bahkan status kewarganegaraan yang melekat pada diri perempuan. Identitas perempuan direduksi sehingga tertunda kehadirannya dalam sistem politik yang ada, identitas perempuan disini ingin dikembalikan pada identitas alamiah mereka yang sebenarnya (dan sama halnya dengan identitas yang laki-laki miliki), yakni identitas perempuan sebagai *political being*. Selama ini perempuan kurang dianggap sebagai "mahluk politik", padahal hal tersebut merupakan sifat alamiah yang sebenarnya mereka miliki dan sekaligus merupakan sifat alamiah manusia lainnya.



- ❖ Memperkenalkan beberapa teori feminis politik seperti teori yang berasal dari Chantal Mouffe dan Anne Philips sebagai sebuah kajian yang sangat tepat dalam membongkar persoalan perempuan dengan politik. Selain itu, terdapat analisis perbandingan antara kedua teori tersebut yang kemudian dirumuskan dalam bentuk kombinasi baru, sebuah bentuk maupun sistem politik yang mampu terbuka pada keberadaan perempuan dan tidak menjadikan perempuan sebagai warga kedua.

## 1.5 METODE (KERANGKA TEORI)

Metode penelitian yang digunakan adalah dekonstruksi, *analysis comparison* dan refleksi kritis. Metode dekonstruksi digunakan untuk membongkar konspirasi politik yang telah dibangun oleh patriarkal dan membongkar ketertundaan hadirnya identitas perempuan dalam politik. Dengan demikian dapat didapatkan sebuah sistem politik baru yang mampu membuka identitas perempuan secara terbuka dalam politik. Metode analisis perbandingan digunakan untuk membandingkan teori politik serta sistem politik yang dianggap mampu menghadirkan cita-cita feminis terkait dengan peran perempuan dalam politik, metode ini membantu untuk melihat baik buruknya suatu konsep politik demokrasi.

Metode di atas pertama-tama akan diarahkan untuk menjelaskan secara jelas mengenai feminis politik kemudian akan memasukkan feminis politik pada persoalan hubungan perempuan dan politik. Penulisan akan lebih ditekankan pada kepustakaan dan bacaan sumber, selain itu akan dimasukkan pula data-data yang mendukung gagasan penelitian baik berupa data statistik maupun data tabel. Sumber bacaan yang digunakan dalam penulisan utama teori feminis politik adalah buku *Feminism, Citizenship and Radical Democratic Politics* oleh Chantal Mouffe dan *Feminist Politics* oleh Anne Philips.

Teori Chantal Mouffe dan Anne Philips turut dijadikan kerangka teori dalam penulisan ini, mereka berdua memiliki pola pemikiran yang tajam dalam menganalisa persoalan perempuan dan politik, bahkan mereka juga menuntun

tulisan untuk mendapatkan sebuah konsep politik yang ramah perempuan, sebuah konsep politik yang mampu memberikan ruang yang sama baik antara laki-laki maupun perempuan. Mouffe fokus pada persoalan identitas perempuan, kewarganegaraan serta demokrasi radikal. Baginya batasan dari konsepsi kewarganegaraan modern seharusnya dikonstruksi pada suatu konsep baru dimana *sexual difference* menjadi suatu hal yang tidak lagi relevan. *Sexual difference* seharusnya tidak menjadi perbedaan dalam domain politik dan kewarganegaraan. Mouffe berpegang pada konsep demokrasi radikal dan menurutnya demokrasi radikal tidak hanya butuh model perbedaan seksualitas kewarganegaraan yang mana tugas laki-laki dan perempuan harus dinilai, tetapi sangat membutuhkan suatu konsep yang berbeda mengenai *what it is to be a citizen and to act as a member of democratic political community*. Sementara Anne Philips memiliki pemikiran yang sedikit berbeda dengan Mouffe, Anne menekankan pada *politics of difference* yang berlaku dan implikasi dari pelaksanaan sistem *politics of difference*.

## 1.6 **THESIS STATEMENT**

Identitas perempuan sebagai *political being* hadir tertunda dalam sistem politik yang telah dikonstruksi oleh patriarkal.

## 1.7 **SISTEMATIKA PENULISAN**

Berikut adalah sistematika per bab yang akan digunakan dalam penulisan ini:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang diangkat, rumusan masalah, landasan teori yang digunakan, tujuan dari penulisan, metode yang digunakan dalam penulisan ini, *thesis statement* dan sistematika penulisan.

### BAB II: POLITIK dari SEKSUAL hingga TEKSTUAL

Bab ini menjelaskan hubungan antara feminisme dan politik serta menunjukkan usaha feminisme dalam mendobrak politik melalui pendekatan seksual hingga tekstual. Politik seksual dan tekstual disini diwakili oleh tokoh feminis Kate Millet, Helene Cixous dan Luce Irigaray. Politik seksual dan tekstual akan dikombinasikan untuk mendapatkan rumusan inti dari persoalan politik terhadap perempuan.

### BAB III: DEKONSTRUKSI IDENTITAS PEREMPUAN MELALUI FEMINIS POLITIK

Bab ini dimulai dengan mempersoalkan identitas perempuan dalam sistem politik yang selama ini telah terbungkam dan terpinggirkan. Sistem politik demokrasi dimunculkan disini sebagai penunjang terciptanya identitas perempuan sebagai makhluk politik, meski demikian keraguan dan nilai minus demokrasi tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sistem yang tepat bagi pemenuhan identitas perempuan. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan teori feminis politik Chantal Mouffe dan Anne Philips. Kedua teori ini dipakai sebagai alat pandu dalam merumuskan persoalan yang ada antara perempuan dan politik. Teori feminis politik ini sangat membantu penulisan karena memiliki cakupan jaring pembahasan yang luas mengenai persoalan perempuan dan politik, yang tentunya tidak hanya dilihat dari satu sisi politik semata. Kedua teori tersebut mengantarkan pada persoalan utama kajian feminis politik, yakni persoalan ruang privat dan publik perempuan serta kewarganegaraan perempuan.

### BAB IV: POLITIK TERBUKA

Bab ini merupakan bab dimana segala persoalan yang telah di bahas pada bab sebelumnya akan dipecahkan dan dibongkar secara radikal. Penulis memulai dengan membahas akar dari pembatasan ruang privat dan publik perempuan yang bersumber dari persoalan *nature* (diidentikkan dengan perempuan karena fungsi fisiologinya) dan *culture* (diidentikkan dengan laki-laki karena kelebihan yang dimilikinya) yang telah melembaga. Setelah itu adanya penyelidikan terhadap politik yang berlangsung selama ini, dimana makna utama dari politik tersembunyi oleh "politik" yang dipenuhi dengan intrik kotor, adanya degradasi

makna politik serta tak ketinggalan degradasi demokrasi. Meskipun begitu, demokrasi masih memiliki secercah harapan untuk diaplikasikan dengan benar. Bab ini turut membahas keterwakilan perempuan dalam sistem politik demokrasi, sejauh mana demokrasi telah mampu merangkul perempuan ke dalamnya dan sejauh mana perempuan telah berpartisipasi aktif dalam demokrasi. Pada akhir bab, dirumuskan sebuah sistem politik baru yang mampu menampung perempuan dan laki-laki dengan adil di dalamnya. Sebuah konsep politik yang ramah gender dan dihasilkan melalui proses analisis reflektif dan perbandingan. Dengan konsep politik ini perempuan tidak terbatas lagi untuk masuk pada ranah publik politik serta perempuan memiliki identitas diri secara penuh, bukan berdasarkan apa yang politik laki-laki inginkan tetapi berdasarkan atas apa yang mereka inginkan.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab akhir ini berisi bahasan mata rantai politik perempuan yang tidak hanya ada di Indonesia namun juga di negara-negara lain yang telah lebih dulu menyertakan perempuan ke dalam sistem politiknya. Selain itu, terdapat gagasan yang dapat diaplikasikan dalam menunjang serta mempercepat keberadaan perempuan di dalam politik dan terdapat penjelasan terhadap posisi perempuan yang memiliki potensi lebih kuat untuk mewakili suara-suara perempuan serta kelebihan yang dimiliki perempuan jika berada di dalam pemerintahan.